

**Pengaruh Peran Pemerintah Daerah Terhadap Optimalisasi
Pendapatan Pajak Daerah**

(Survey Terhadap Petugas Pajak Dinas Pendapatan Kota Ambon)

Abdullah Sanduan
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon
a.sanduan77@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to know, analyze and obtain empirical evidence about the influence of the Role of Regional Government on the optimization of regional tax revenue. (Survey of Tax Officers of the Ambon City Revenue Office) The independent variable in this study is the Role of Regional Government. The dependent variable in this study is the optimization of regional tax revenue. The data in this study is primary data obtained from the distribution of questionnaires directly to all tax collectors of the Ambon City Revenue Office and secondary data as support. The analysis model used to test the hypothesis is a quantitative analysis in the form of sampling. This analysis is based on data from 40 respondents of the Ambon City Regional Revenue Office through the distribution of questionnaires. The results of this study show that the Role of Regional Government simultaneously has a significant effect on the optimization of regional Tax Revenue partially. The Role of Regional Government has a significant effect on the optimization of regional Tax Revenue, in Ambon City.

Keywords: Role of Regional Government, Optimization of Regional Tax Revenue

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisa dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh Peran Pemerintah Daerah terhadap optimalisasi Pendapatan Pajak daerah. (Survey Terhadap Petugas Pajak Dinas Pendapatan Kota Ambon). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Peran Pemerintah Daerah. Untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah optimalisasi Pendapatan Pajak daerah. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada seluruh petugas pemungut pajak dinas pendapatan Kota Ambon dan data sekunder sebagai pendukung. Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis kuantitatif berupa sampling, analisis ini didasarkan pada data dari 40 responden pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon melalui penyebaran kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan Peran Pemerintah Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi Pendapatan Pajak daerah secara parsial. Peran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi Pendapatan Pajak daerah, di Kota Ambon.

Kata Kunci : Peran Pemerintah Daerah, Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah

1 PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah telah melakukan reformasi Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi sebagai upaya untuk memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga pemerintah daerah mampu melaksanakan otonomi daerah.

Keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pajak daerah, tidak terlepas dari peranan

organisasi pengelola pajak daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Ambon. Seperti yang dikemukakan oleh **Abdul Halim (2002 : 322)** bahwa Dipenda secara khusus dan bersama-sama instansi terkait bertugas untuk melakukan pendataan, penagihan dan penyetoran pajak daerah dan Dipenda juga mempunyai tugas antara lain meningkatkan penerimaan pajak daerah. Jenis pajak daerah yang dikelola oleh Dipenda adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan Jalan, pajak parkir, pajak rumah kost

Pendapatan atas pajak daerah adalah penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah atau sesuai dengan peraturan yang berlaku (Moch. Husein Jachyasaputra, 2001:4). Pendapatan pajak daerah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pendapatan pajak daerah yang optimal, artinya tidak semata-mata hanya meningkatkan dari segi kuantitas (angka riil) pendapatan pajak daerah tetapi memperhatikan juga kualitas dari pelaksanaan pemungutan pajak tersebut.

Berdasarkan kondisi-kondisi yang telah diuraikan di atas, masalah yang dimunculkan dalam penelitian ini merupakan hasil menelaah kebijakan (policy) pemerintah sehingga diperoleh gambaran latar belakang situasional, kondisional serta empirikal mengenai penelitian ini dengan tema sentral yang dapat dirumuskan sebagai berikut : peran pemerintah daerah berpengaruh secara langsung/tidak langsung terhadap optimalisasi pendapatan pajak daerah.

Berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan (shifting authority) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan diikuti dengan pembiayaan. Mengingat tidak semua sumber pembiayaan diberikan kepada daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk menggali sumber keuangannya sendiri. Hal ini menggugah untuk meneliti lebih lanjut tentang Peran Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Pajak daerah. Kajian Teoritis

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut **P.J.A. Adriani** dalam **Mohammad Zain (2003 : 10)** dikatakan bahwa : “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Ria ratna Ariawati (1995 : 29), mengemukakan peran adalah serangkaian pola perilaku yang diharapkan dari seseorang, karena memegang posisi tertentu dalam suatu unit social. Hal yang senada dikemukakan oleh Robbins (2001 : 227), peran merupakan pola tingkah laku yang diharapkan oleh para anggotanya dari seseorang yang menduduki suatu jabatan tertentu di dalam suatu hierarki organisasi. Dengan demikian posisi yang dipegang seseorang menuntut perilaku tertentu dari pemegangnya.

Berdasarkan pengertian di atas, peran pemerintah dalam konteks penelitian ini adalah menyangkut tentang bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan pajak daerah yang tentunya harus memperhatikan pula kewenangan yang dimilikinya yang diimbangi dengan hak dan kewajibannya. Sub variabel dari peran dan orientasi pemerintah daerah:

- Program (*Programs*), Program adalah suatu rencana yang pada dasarnya telah menggambarkan rencana yang konkrit. Konkritnya rencana bahwa di dalam program sudah tercantum baik objective, policy, procedure. Dengan demikian program merupakan pula usaha-usaha untuk mengefektifkan dan mengefisienkan rangkaian tindakan yang harus dilaksanakan menurut bidangnya masing-masing (Arifin Sabeni, 2004:52).
- Anggaran (*Budgets*), adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan (Wheelen & Hunger, 2002 : 15).

o Prosedur (*Procedures*), Prosedur kadang-kadang disebut Standar Operating Procedures (SOP). Prosedur adalah system langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan (Wheelen & Hunger, 2002 : 15).

Peran pemerintah daerah sangat erat kaitannya dengan kinerja, sehubungan dengan itu, tinggi rendahnya peran dan orientasi pemerintah daerah sangat erat hubungannya dengan kinerja pemerintah daerah. Kinerja tersebut tercermin dalam optimalisasi pendapatan pajak daerah.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah survey sedangkan metodenya adalah deskriptif analitis. Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer berupa isian kuesioner dari petugas pajak daerah yang berada dalam ruang lingkup kewenangan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Ambon serta data sekunder berupa laporan realisasi penerimaan pajak daerah yang ada di Kota Ambon.

Sekaran (2003 : 87), menyatakan bahwa : "A variable is anything that can take on differing or varying values. The values can differ at various times for the same objects or persons, or the values can vary at the same time for different objects or persons". Variabel bebas (*independent variable*) yaitu peran pemerintah daerah diukur dengan menggunakan skala ordinal, sedangkan variabel terikat (*dependent variable*) yaitu pendapatan pajak daerah diukur dengan menggunakan skala rasio. Untuk mengetahui data apa yang diperlukan dalam penelitian ini maka perlu dilakukan operasionalisasi dari variabel-variabel seperti yang telah diinventarisasi pada latar belakang dan kerangka pemikiran dengan tujuan untuk menentukan indikator-indikator variabel yang bersangkutan dan sekaligus untuk menentukan instrumen atau pengukuran variabel.

Sampel Penelitian

Nur Indriantoro & Bambang Supomo (1999 : 115) mengatakan bahwa sampel merupakan bagian dari elemen-elemen populasi. Sampel pada penelitian ini ditarik dari populasi sasaran yaitu seluruh petugas pemungut dari Dipenda Kota Ambon.

Untuk menarik sampel dari populasi tersebut digunakan rumus **Taro Yamane** (**M. Sudrajat Sw**, 2002 : 25) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{(N.d^2) + 1}$$

Dimana :

n = ukuran sampel
d = presisi yang besarnya ditentukan
N = ukuran populasi

Presisi menunjukkan tingkat ketepatan hasil penelitian berdasarkan sampel dan menggambarkan karakteristik populasi. Presisi yang digunakan dalam penelitian ilmu sosial adalah 10% sehingga ukuran sampel dapat dihitung sebagai berikut :

Sampel untuk petugas yang menangani penerimaan/pemungutan pajak daerah :

$$n = \frac{66}{1,66} = 39,76 \text{ dibulatkan} = 40$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji Validitas

Analisis alat ukur penelitian dilakukan untuk menguji apakah instrumen penelitian yang digunakan memenuhi syarat-syarat alat ukur yang baik atau tidak. Instrumen dikatakan baik apabila instrumen penelitian tersebut memenuhi persyaratan utama yaitu : valid (shahih) dan reliabel (andal). Berikut ini analisis hasil pre-test kuesioner yang akan digunakan untuk uji coba alat ukur ini berjumlah 40 orang. Pengujian dilakukan dengan mengkorelasikan antara skor setiap item pertanyaan dengan skor total variabel.

Variabel peran pemerintah daerah diukur dengan 21 item pertanyaan. Hasil dari perhitungan koefisien korelasi untuk 21 pertanyaan yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian X

Variabel Item	Korelasi Item - Total	Nilai Batas	Keterangan
1	0.826	0.30	Valid
2	0.483	0.30	Valid
3	0.749	0.30	Valid
4	0.525	0.30	Valid
5	0.670	0.30	Valid
6	0.653	0.30	Valid
7	0.815	0.30	Valid
8	0.834	0.30	Valid
9	0.834	0.30	Valid
10	0.847	0.30	Valid
11	0.661	0.30	Valid
12	0.874	0.30	Valid
13	0.707	0.30	Valid
14	0.770	0.30	Valid
15	0.823	0.30	Valid
16	0.702	0.30	Valid
17	0.737	0.30	Valid
18	0.772	0.30	Valid
19	0.733	0.30	Valid
20	0.736	0.30	Valid
21	0.682	0.30	Valid

Sumber : Data Olahan

Dengan menggunakan kriteria seperti yang dikemukakan oleh Syaifuddin Azwar (1997 : 158) bahwa untuk menentukan suatu item kuesioner valid atau tidak, maka digunakan nilai kritis (batasan) 0,3. Sehingga item yang memiliki korelasi diatas 0,3 dikategorikan valid, sedangkan item yang memiliki korelasi dibawah 0,3 dikategorikan tidak valid dan tidak diikutkan dalam analisis selanjutnya.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Hasil perhitungan koefisien reliabilitas untuk 21 butir pernyataan variabel peran pemerintah daerah dengan menggunakan metode *split-half* diperoleh sebesar 0,9741 Hasil ini menunjukkan bahwa jika alat ukur ini digunakan berulang kali diharapkan sebanyak 97,41 % kecenderungan hasil untuk variabel peran pemerintah daerah akan relatif sama.. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan untuk kedua variabel dinyatakan reliable.

3. Model Regresi

Guna menguji pengaruh ”peran pemerintah daerah (X)”, terhadap pendapatan pajak daerah (Y)” untuk pajak restoran di Kota Ambondigunakan analisis regresi linier berganda dengan model persamaan:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \varepsilon$$

Dimana:

- Y : adalah pendapatan pajak daerah
- B : adalah koefisien regresi
- X1 : adalah peran pemerintah daerah
- ε : adalah variabel lain yang tidak diuji

Tabel 4.2 : Koefisien Regresi Dan Uji Signifikansi Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.474	.078		5.598	.000
Peran Pemda (X1)	.087	.025	.442	3.318	.004

a. Dependent Variable: Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah (Y) Sumber: Output SPSS 10.0 for Windows berdasarkan data penelitian.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan pada tabel di atas, dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 0,474 + 0,087X$$

Model ini menjelaskan bahwa setiap peningkatan peran pemerintah daerah sebesar satu satuan akan meningkatkan pendapatan pajak daerah sebesar 0,087%.

Kemudian jika tidak ada peran pemerintah daerah maka pendapatan pajak daerah berada pada posisi positif 0,474

4. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan sebagai syarat dalam menggunakan analisis regresi linear. Uji asumsi yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas.

Uji Normalitas

Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel *Kolmogorov-Smirnov* untuk menguji normalitas data residu. Dengan menggunakan *Software SPSS versi 10.0 for Windows* diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas

	Tests of Normality ^a		
	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.121	15	.187*

*. This is a lower bound of the true significance.

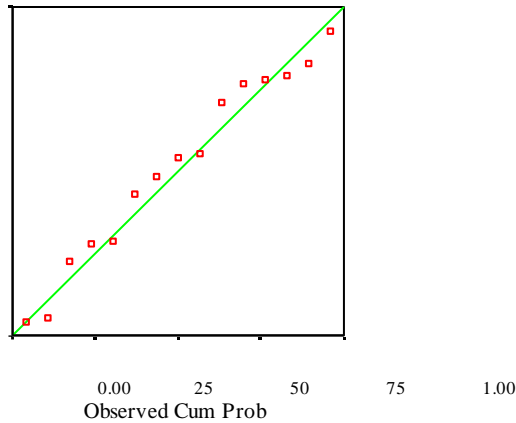
a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Output SPSS 10.0 for Windows berdasarkan data hasil penelitian.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai D hitung adalah 0,121 sedangkan nilai D dari tabel untuk $\alpha = 0,05$ dan $n = 15$ adalah 0,219. Karena nilai D hitung lebih kecil dari D tabel, maka dapat disimpulkan bahwa residu hasil model regresi yang diperoleh berdistribusi normal. Selain itu dapat dilihat nilai Sig sebesar 0,187 yang berarti lebih dari 0,05 maka mempertegas bahwa residu/error berdistribusi normal.

Berikut ini, grafik yang menunjukkan bahwa semua titik-titik nilai residual menyebar di sekitar garis diagonal. Hal ini secara visual menunjukkan data berdistribusi normal.

1.00



Gambar 4.1. Grafik Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Optimalisasi Pendapatan Pajak daerah (Y)

Uji Multikolinieritas

Pada penelitian ini digunakan nilai *Variance Inflation Factors (VIF)* sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas. Tabel berikut menyajikan hasil uji multikolinieritas untuk variabel bebas.

Tabel 4.4. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Peran Pemerintah daerah (X)	.952	1.046

b. Dependent Variable Optimalisasi pajak daerah (Y)

Sumber: Output SPSS 10.0 for Windows berdasarkan data hasil penelitian

Nilai VIF untuk kedua variabel X dari tabel di atas terlihat kurang dari 10 yang menunjukkan tidak adanya korelasi yang cukup kuat antara variabel bebas. Selain itu nilai *tolerance* kurang dari 1 juga menunjukkan tidak adanya multikolinieritas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antara variabel bebas.

Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas merupakan indikasi bahwa varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji korelasi *Rank Spearman*, yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error). Adanya koefisien korelasi dari variabel bebas yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heterokedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada koefisien korelasi dari variabel bebas yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, berarti tidak ada heterokedastisitas.

Tabel 4.5. Hasil Uji Heterokedastisitas

Correlations^a

			Nilai Absolut Residu	Peran Pemerintah daerah (X)
Spearman's rho	Nilai Absolut Residu	Correlation Coefficient	1.000	-.037
			Sig. (2-tailed)	.887
	Peran Pemerintah daerah (X)	Correlation Coefficient	-.037	1.000
			Sig. (2-tailed)	.887

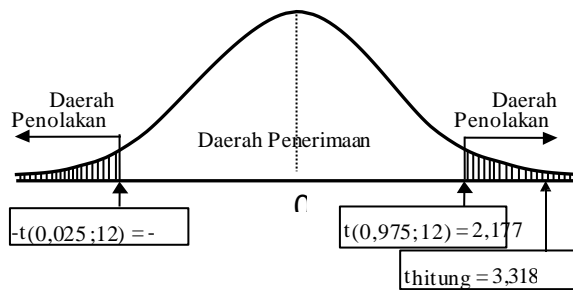
a Listwise N = 15

Sumber: Output SPSS 10.0 for Windows berdasarkan data hasil penelitian

Dari hasil perhitungan pada tabel di atas terlihat bahwa nilai signifikansi dari koefisien korelasi variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (absr) adalah sebesar 0,887 untuk variabel peran pemerintah daerah (X) dan variabel tersebut memiliki tingkat signifikansi

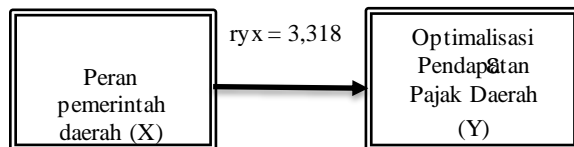
diatas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual (*error*) yang muncul dalam persamaan regresi mempunyai varians yang sama atau tidak terjadi heterokedastitsitas.

Dengan demikian semua asumsi regresi klasik telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dilakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian



Pengujian Hipotesis

Bagian ini merupakan bagian pokok dari analisis kuantitatif yaitu bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis penelitian, dilakukan dengan menggunakan teknik multiple regresi melalui program SPSS 10. Dan dengan menggunakan data hasil penyebaran kuesioner, di antaranya diperoleh hasil Hubungan Korelasi sebagai berikut :



Gambar 4.2.

Hasil Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial

Pengujian koefisien regresi secara individual merupakan kelanjutan dari pengujian model regresi secara simultan, apabila pada pengujian model regresi secara bersama-sama (simultan) Ho ditolak, artinya ada variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas, maka untuk mengetahui variabel mana yang pengaruh signifikan diuji dengan pengujian regresi secara parsial.

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran pemerintah daerah dan orientasi pemerintah daerah secara parsial terhadap pendapatan pajak daerah.

Pengaruh Peran pemerintah daerah terhadap Pendapatan pajak daerah

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh peran pemerintah daerah terhadap pendapatan pajak daerah. Hipotesis yang diajukan adalah:

$H_0 : \beta_1 = 0$ Peran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah.

$H_a : \beta_1 \neq 0$ Peran pemerintah daerah berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah.

Pengaruh variabel peran pemerintah daerah terhadap pendapatan pajak daerah diketahui dari nilai β_1 yang positif sebesar 0,090 dengan t hitung sebesar 3,318 dan tingkat signifikansi 0,004.

Penentuan hasil pengujian (penerimaan/penolakan H_0) dapat dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Nilai tabel t-student dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas = $15-2-1 = 12$ untuk pengujian dua sisi adalah 2,177. Kriteria pengujian dua sisi adalah “tolak H_0 jika t-hitung > t-tabel atau t-hitung < negatif t-tabel”.

Secara visual dapat digambarkan hasil perbandingan thitung dengan ttabel untuk pengambilan keputusan seperti pada gambar berikut dimana terlihat nilai thitung berada disebelah kanan ttabel atau berada di daerah penolakan H_0

Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 pada Uji Parsial – 1

Karena nilai t-hitung untuk X_1 sebesar 3,318 lebih besar dari nilai t-tabel = 2,177 atau jika dilihat nilai signifikansi 0,004 lebih kecil dari tingkat kekeliruan 5% ($\alpha = 0,05$), maka dapat diambil keputusan untuk menolak H_0 . Hasil pengujian dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah.

Besarnya pengaruh peran pemerintah daerah dapat dilihat dari nilai *Standardized Coefficients* pada tabel. Diperoleh koefisien beta sebesar 0,442. Jadi secara parsial peran pemerintah daerah berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah sebesar $0,442^2 \times 100\% = 19,5\%$.

Pengaruh Peran pemerintah daerah terhadap Pendapatan pajak daerah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Peran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan pajak daerah Kota Ambon Provinsi Maluku. Artinya setiap peningkatan Peran pemerintah daerah akan diikuti oleh peningkatan Pendapatan pajak daerah Kota Ambon. Besarnya pengaruh variabel eksogen tersebut adalah 19,5%, dan sisanya sebesar 80,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan kepada interpretasinya *guilford*, tingkat pengaruhnya berada pada tingkatan cukup. Dapat dikatakan bahwa Peran pemerintah daerah dalam hal ini petugas pajak Dinas Pendapatan Kota Ambon menjadi faktor determinan untuk mencapai Pendapatan pajak daerah Kota Ambon kepada level yang baik, meskipun masih ada sejumlah variabel lain yang diduga juga ikut mempengaruhi pencapaian tingkat Pendapatan pajak daerah Kota Ambon tersebut. Oleh karena itu, petugas pajak harus melakukan peningkatan peranan dalam memungut pajak yang mereka miliki, demi peningkatan Pendapatan pajak daerah Kota Ambon kepada tingkat yang lebih baik, sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup Kota Ambon.

Adanya pengaruh yang kuat tersebut menjelaskan bahwa fungsi petugas pajak pada Dinas Pendapatan Kota Ambon telah berjalan cukup baik, sehingga dapat membantu pimpinan dengan baik. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh peraturan perpajakan bahwa Fungsi pajak untuk meningkatkan pendapatan Kota/Negara dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses *perpajakan bagi setiap usaha*. Hasil penelitian ini juga menambah keyakinan bahwa wajar apabila Dinas Pendapatan Kota Ambon beberapa tahun belakangan ini mendapatkan perhatian dari pengusaha, yang melakukan pembayaran pajak dan pemantauan terhadap kinerja petugas pajak tersebut. Atas dasar penelitian yang

dilakukan terlihat bahwa pihak Kepala Dinas telah mengoptimalkan peran mereka, sehingga Dinas Pendapatan Kota Ambon dapat dikelola dengan baik, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian didukung oleh **Fatimah Sonda** (2004) menyatakan bahwa pendapatan daerah dari sektor pajak hotel cukup fluktuatif, sehingga sangat banyak faktor yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan dan pengelolannya. Salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam hal ini adalah faktor kebijakan. Dan juga didukung oleh penelitian yang dilakukan **Bushman et. al.** (2004) menyatakan bahwa suatu aturan yang menyangkut hajat masyarakat luas hendaknya selalu dilakukan evaluasi kinerjanya dan memiliki daya lentur yang cukup tinggi, untuk selanjutnya dikondisikan dengan situasi saat ini., dan mendukung penelitian **Tannenwald** (2001) menyatakan bahwa faktor yang menentukan tax capacity selain pendapatan perkapita juga faktor pengetahuan masyarakat untuk membayar pajak dan kecakapan pemerintah dalam pengumpulannya

5. KESIMPULAN

Simpulan

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh peran pemerintah daerah dan orientasi pemerintah daerah terhadap pendapatan pajak daerah untuk pajak Hotel di Kota Ambon menunjukkan :Pengaruh Peran dan orientasi pemerintah daerah terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Ambon :

- Secara parsial, variabel Peran pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap optimalisasi pendapatan pajak daerah (hipotesis diterima).

Saran dan Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Ambon, diharapkan agar
 - a. Menyusun *master file* objek dan wajib pajak secara lengkap dan akurat yang selalu diperbaharui, peta potensi pajak hotel serta menyusun laporan target dan realisasi pelunasan pajak secara terinci yang menggambarkan potensi yang sebenarnya, sehingga dalam penetapan target pelunasan se sesuai dengan potensi riil berdasarkan perkembangan terakhir serta dapat menunjukkan prestasi masing-masing jenis hotel. Misalnya dengan menyediakan format penyusunan *master file* dengan cara memasukkan data berdasarkan jenis/bentuk perusahaan ataupun bekerjasama dengan instansi terkait lainnya seperti kantor perindustrian dan perdagangan untuk memperoleh data tentang wajib pajak sehingga dapat disusun data subjek, objek dan wajib pajak yang sebenarnya.
 - b. Program penyuluhan perpajakan harus dilakukan secara intensif dan merata kepada seluruh wajib pajak serta memberikan pemahaman kepada wajib pajak akan kegunaan pajak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyuluhan harus dibuat sedemikian rupa sehingga menarik perhatian masyarakat untuk menerima dan mengikuti penyuluhan pajak.
 - c. Menyusun dan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan di bidang perpajakan bagi petugas pajak guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas pajak sehingga dapat melaksanakan pemungutan pajak secara efektif serta mampu menggali potensi pajak daerah yang sebenarnya. Selain itu petugas pajak harus memahami dan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada sehingga mampu memberikan pemahaman serta dapat menerapkannya secara efektif kepada wajib pajak.
 - d. Seyogyanya menerapkan sanksi-sanksi perpajakan secara tegas sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.
2. Bagi peneliti berikutnya, disarankan agar dalam penelitian selanjutnya :dapat memperluas populasi dan sampel hotel serta jika memungkinkan meneliti langsung ke wajib pajak hotel.

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain :

1. Data yang dianalisis dalam penelitian ini hanya terbatas pada data yang dikumpulkan dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Ambon, oleh karena itu generalisasi hasil penelitian hanya

terbatas pada Kota Ambon.

2. Hasil penelitian ini sangat tergantung pada kejujuran para responden dalam menjawab kuesioner, namun peneliti telah berusaha untuk meminimalkan terjadinya ketidakjujuran dengan cara mendampingi langsung pengisian kuesioner serta melakukan wawancara kepada responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Affifudin, Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Ahmad Tjahjono. Muhammad akhri Husein. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Akademi Perusahaan YKPN.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Herlina, Rahman. 2005. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta : Arifgosita. Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfa Beta
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : Penerbit Andi Marihot.
2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Ma'ruf & Supatminingsih, (2020). *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. Jurnal Akuntansi Dan Pajak,
- Muhammad Ardy Utami (2018). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan*.
- Muhammad F. R. M,(2019). *Pengaruh Peran Petugas Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Mulyadi. 2014. *Metode Penelitian Praktis Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Publica Institute
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Mulyadi. 2014. *Metode Penelitian Praktis Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Publica Institute
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Pernama Artha (2016). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi, Vol. 6 No. 1,*
- Priantara 2016. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta..
- Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Hotel dan Restoran
- Purwono, H, 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah